

PENINGKATAN KESADARAN POLITIK DENGAN LITERASI DEMOKRASI DI DESA NGLINGGI KABUPATEN KLATEN JAWA TENGAH

Adi Bayu Mahadian¹, Ruth Mei Ulina Malau²

^{1,2} Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis, Universitas Telkom, Jl. Telekomunikasi no. 1, Bandung 40257, Indonesia

*E-mail: adibayumahadian@telkomuniversity.ac.id

Abstrak

Kualitas demokrasi di Indonesia bergerak secara dinamis. Pada periode tertentu dianggap membaik, namun pada periode berikutnya dianggap memburuk. Situasi tersebut diasumsikan sebagai implikasi pada adopsi demokrasi yang masih berproses. Masyarakat sebagai pengguna demokrasi menjadi ujung tombak implementasi demokrasi yang baik. Selama masyarakat tidak berdemokrasi dengan baik, maka kualitas demokrasi Indonesia tidak akan pernah mapan. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan untuk memperkuat pemahaman tentang demokrasi masyarakat Desa Nglingsi, sebuah desa yang dinilai telah mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan praktik berdemokrasi yang berkualitas. Program pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan melalui tiga kegiatan utama, pertama pengumpulan data pemahaman demokrasi masyarakat desa, pembuatan buku saku Literasi Demokrasi, dan diseminasi Literasi Demokrasi bagi masyarakat.

Kata Kunci: *Demokrasi Indonesia, Literasi Demokrasi, Literasi Politik, Sosial Media*

1. Pendahuluan

Dua puluh empat tahun berdemokrasi, Indonesia masih berproses untuk menemukan bentuk demokrasi yang ideal dan selaras dengan budaya yang dianut masyarakatnya. Pada periode waktu tertentu, Indonesia dianggap menjalankan demokrasi yang baik. Namun pada periode yang lain, kualitas demokrasi Indonesia dianggap memburuk (Aspinall et al., 2020; Diprose et al., 2019; Mietzner & Muhtadi, 2018; Tapsell, 2017). Beberapa ilmuwan mencoba memahami dan menawarkan perspektif baru terkait demokrasi yang dianut negara-negara di Asia, termasuk Indonesia, sebagai respon terhadap universalitas konsep “demokrasi Barat”. Konsep demokrasi dengan nilai-nilai Asia (*Asian Values*) yang dikemukakan Amartya Sen (1997) adalah yang banyak diperdebatkan ilmuwan politik hingga hari ini.

Sen (1997) berargumen bahwa negara-negara Asia memiliki masyarakat dengan nilai dan budaya yang berbeda dengan masyarakat barat. Masyarakat barat yang menjunjung tinggi kebebasan, hak asasi manusia, dan kapitalisme. Sementara masyarakat Asia lebih mementingkan tatanan sosial, ketaatan, dan disiplin sebagai landasan berdemokrasinya. Argumentasi Sen memiliki keselarasan dengan konsep demokrasi Indonesia yang disampaikan Muhammad Hatta (1960), bahwa demokrasi Indonesia bukan demokrasi yang mereplikasi demokrasi barat. Namun, perbedaan manifestasi konsep demokrasi

Asia ini dianggap memiliki banyak cacat. Demokrasi dengan nilai-nilai Asia dianggap sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan para pemimpin di Asia. Artikel yang ditulis Hasanah (2019) misalnya, menunjukkan bahwa nilai-nilai Asia menjadi salah satu instrumen politik Orde Baru untuk mengabaikan hak asasi manusia, untuk dalih stabilitas pemerintahan.

Demokrasi dengan nilai-nilai Asia ini dianggap berhasil diterapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pemerintahannya. Mahbubani (2021) bahkan mengklaim Jokowi adalah pemimpin jenius yang berhasil meredam perpecahan politik sekaligus memajukan perekonomian Indonesia dengan menerapkan demokrasi dengan nilai-nilai Asia. Klaim ini menimbulkan perdebatan baru, dengan mempertimbangkan argumentasi beberapa ilmuwan terkait penurunan kualitas demokrasi pada pemerintahan kedua Presiden Jokowi (Aspinall et al., 2020; Aspinall & Mietzner, 2014; Diprose et al., 2019). Argumentasi terkait penurunan demokrasi tersebut, diperkuat dengan munculnya Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang diperdebatkan publik sebagai bentuk pengekan terhadap kebebasan berpendapat dan demokrasi (Tempo, 2022). Perdebatan ini melahirkan. Jika ditelusuri, respons ini merujuk sejak era Imperialisme Jerman dan Era Meiji di Jepang (Thompson, 2015). Sebagai responsnya terhadap praktik demokrasi di era Orde Lama, di

bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, yang dianggap telah menyimpang.

Praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih perlu perbaikan, terutama kelompok masyarakat yang terabaikan. Masyarakat pedesaan merupakan kelompok terabaikan yang luput dari Gerakan pemberdayaan masyarakat terpelajar perkotaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan banyak Gerakan pemberdayaan masyarakat pedesaan untuk meningkatkan literasi demokrasi dan politik. Pada kegiatan kali ini, kami memilih Desa Nglingsi Kecamatan Klaten Kabupaten Klaten. Pemilihan lokasi Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan. Pertama, Desa Nglingsi merupakan desa Anti Politik Uang dalam pemilihan kepala desa, yang ditetapkan oleh Bawaslu, dan Desa Percontohan Restorative Justice dari Kejaksaan Negeri Klaten. Kondisi desa yang baik ini, menjadi kasus positif untuk dijadikan model yang dapat diimplementasikan pada desa-desa lain di Indonesia. Kedua, kondisi berjalan saat ini perlu dukungan dan pengelolaan, sehingga program pengabdian kepada masyarakat ini dijadikan bentuk dukungan dan penguatan demokrasi di desa Nglingsi.

2. Metodologi

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini akan berlangsung dari bulan September 2023 hingga Agustus 2024. Kegiatan dilakukan melalui tiga tahap. Tahap pertama pemahaman kondisi masyarakat Desa Nglingsi, kedua penyusunan Buku Saku Literasi Politik, dan diseminasi buku saku dan implementasi Literasi Demokrasi dan Politik Bertanggung Jawab, ketiga evaluasi.

Kegiatan ini merupakan bagian dari peta jalan tridarma Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Telkom yang melaksanakannya, yaitu pemberdayaan masyarakat yang berfokus pada penguatan nilai-nilai demokrasi di masyarakat. Sehingga kegiatan ini menjadi bagian riset dan abdimas dosen terkait. Dalam kaitannya dengan ini, abdimas ini berpotensi untuk dilanjutkan di desa-desa lain di Indonesia. Selain itu, buku saku yang menjadi salah satu luaran kegiatan ini dapat digunakan pada kegiatan lainnya, dan menjadi objek tridarma lainnya. Lebih lanjut, buku saku dapat menjadi sumber HAKI universitas untuk digunakan oleh dosen-dosen lain di tempat lain.

3. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Peningkatan Kesadaran Politik Dengan Literasi Demokrasi Di Desa Nglingsi Kabupaten Klaten Jawa Tengah dilakukan melalui tiga tahap. Tahap *pertama*, pemahaman kondisi masyarakat Desa Nglingsi. *Kedua*, penyusunan Buku Saku Literasi Politik. *Ketiga*, diseminasi buku saku dan

implementasi Literasi Demokrasi dan Politik Bertanggung Jawab.

Tahap pertama pemahaman kondisi masyarakat Desa dilakukan melalui penyelenggaraan kegiatan seminar Literasi Demokrasi pada tanggal 22 November 2023 (Gambar 1). Tujuannya adalah mengumpulkan warga desa untuk berkumpul dan mendiskusikan hal ihwal praktik demokrasi di Desa Nglingsi.



Gambar 1. Kegiatan Tahap Pertama, Seminar Literasi Demokrasi

Pada kegiatan pertama, kami mengundang perangkat desa, RW, RT, dan karang taruna. Kegiatan diawali dengan pemaparan materi yang berisi substansi demokrasi.

Pada materi substansi demokrasi, disampaikan terkait latar belakang lahirnya demokrasi, tujuan berdemokrasi, dan praktik demokrasi. Pemberian materi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan terkait substansi demokrasi, dan mengajak peserta untuk berpikir retrospektif terkait Tindakan demokratis yang selama ini mereka lakukan.

Kegiatan berpikir retrospektif pada bagian ini, menjadi dasar untuk tahap persuasif yang dilakukan tahap berikutnya, yaitu menyampaikan gagasan terkait program kegiatan yang menurut para peserta perlukan. Gagasan peserta menjadi dasar untuk mengetahui kesadaran kolektif mereka tentang kehidupan di Desa Nglingsi. Kegiatan ini dilakukan menggunakan Lembar Kerja yang disusun oleh tim pelaksana Pengabdian masyarakat (Gambar 2).



Gambar 2. Lembar Kerja Literasi Demokrasi

Beberapa gagasan peserta dalam Lembar Kerja seperti: “*tambah titik WIFI*”, “*Bangkitkan lagi*

tempat wisata desa”, “*pelatihan keterampilan untuk ibu-ibu*”, “*peningkatan fasilitas Kesehatan di desa*”, “*peningkatan kualitas guru ngaji*”, dan lain-lain (Gambar 3). Keberanian para peserta untuk menyampaikan gagasan menjadi Latihan menyampaikan pendapat dalam demokrasi. Karena pada tahap berikutnya, para peserta diminta untuk menunjukkan peran mereka dalam kegiatan yang mereka usulkan. Strategi ini dilakukan untuk mendorong para peserta terlibat dalam program desa dan bertanggung jawab terhadap gagasan dan pendapat yang mereka sampaikan.



Gambar 3. Salah satu peserta yang sedang mengerjakan Lembar Kerja Literasi Demokrasi

Lebih lanjut, pada kegiatan tahap pertama ini, pemateri menyampaikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan peserta dalam bermedia sosial. Peserta diajak untuk mengidentifikasi beberapa informasi palsu dan konten-konten yang dimanipulasi untuk tujuan politik dan merusak demokrasi. Pada gambar 4, peserta ditunjukkan beberapa contoh konten yang dimanipulasi untuk tujuan menyebarkan informasi palsu, memanfaatkan kebebasan berekspresi di negara demokrasi.

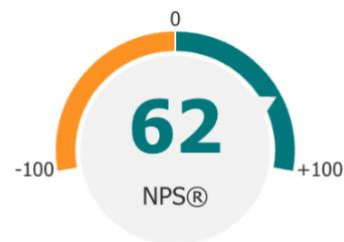


Gambar 4. Peserta ditunjukkan contoh manipulasi foto yang digunakan untuk menyebarkan informasi palsu

Peningkatan pengetahuan dan keterampilan untuk mengidentifikasi informasi palsu di media sosial menjadi penting, terutama menghadapi tahun politik 2023-2024. Pada masa masyarakat akan menghadapi masa kampanye dan Pemilu. Pada kegiatan ini, disampaikan pula terkait substansi pemilihan presiden, bahwa Pemilu merupakan “pesta rakyat”, saat rakyat memiliki kewenangan untuk memahami kebutuhan diri mereka masing-masing, lalu dicocokkan dengan tawaran para kandidat, agar kebutuhan diri setiap

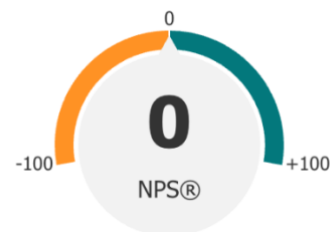
warga negara dapat terpenuhi. Dengan pemahaman ini, diharapkan tidak ada lagi sikap fanatik pada kandidat capres, apalagi konflik antar masyarakat karena membela atau mencemooh kandidat presiden. Sikap-sikap ini merupakan sikap feodalistis yang tidak konstruktif di era demokrasi.

Pada tahap pengumpulan data, selain melalui Lembar kerja, kami juga melakukan survei terkait Literasi Demokrasi. Kami menanyakan beberapa pertanyaan terkait persepsi warga desa terhadap demokrasi. Pertanyaan pertama, kami menanyakan “Saya percaya bahwa demokrasi adalah bentuk terbaik untuk sebuah pemerintahan”. Hasilnya menunjukkan skor positif 62 (Gambar 5). Artinya masyarakat berpersepsi bahwa demokrasi merupakan sebuah sistem pemerintahan yang baik.



Gambar 5. Skor persepsi warga tentang demokrasi sebagai bentuk pemerintahan

Namun, pada pertanyaan kedua yang menanyakan “Saya percaya demokrasi di Indonesia bekerja dengan baik”, hasil survei menunjukkan bahwa skor 0 (Gambar 6). Skor ini menunjukkan bahwa warga cenderung menilai ‘netral’, dan mengindikasikan sikap yang negatif terhadap implementasi demokrasi di Indonesia.



Gambar 6. Skor persepsi warga tentang implementasi demokrasi di Indonesia

Indikasi persepsi negatif terhadap praktik demokrasi di Indonesia diperkuat oleh data pada pertanyaan ketiga yang menanyakan “Saya merasa negeri ini bergerak ke arah yang benar” (Gambar 7), yang menunjukkan skor yang rendah, dan gambar 8 yang menunjukkan skor negatif.



Gambar 7. Skor persepsi warga tentang arah demokrasi Indonesia



Gambar 8. Skor persepsi warga terkait aspirasi yang tidak didengar oleh pemerintah

Saat ditanya tentang jenis pemimpin yang paling disukai, sampai yang paling tidak saya sukai, maka pemimpin yang “merakyat” dipilih paling atas, diikuti “pekerja”, “cendekiawan”, “pemuka agama”, “militeristik”, dan “raja” (Gambar 9).



Gambar 9. Jenis gaya pemimpin yang paling disukai.

Untuk melengkapi jenis pemimpin yang disukai, kami melengkapinya dengan pertanyaan terkait gaya pemimpin yang disukai. Hasil survey menunjukkan bahwa gaya pemimpin demokratis adalah yang paling disukai, dan gaya pemimpin otoriter yang paling tidak disukai (Gambar 10).



Gambar 10. Gaya pemimpin yang paling disukai

Selain beberapa pertanyaan yang telah disampaikan, kami mendapatkan beberapa data lain yang kami gunakan untuk dasar pembuatan Buku Saku Literasi Demokrasi. Buku Saku Literasi Demokrasi ini akan kami susun untuk kemudian kami diseminasikan pada kegiatan tahap ketiga. Diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran politik dengan landasan pemahaman demokrasi yang substantif, bukan hanya untuk menghadapi Pemilu 2024, namun

untuk kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Nglinggi.

Lebih lanjut, berdasarkan dua tahap kegiatan yang telah dilakukan, maka kami akan Menyusun Buku Saku Literasi Demokrasi. Buku Saku Literasi Demokrasi akan berisi beberapa substansi, diantaranya: introduksi demokrasi, catatan demokrasi di masa lalu, prinsip-prinsip demokrasi, demokrasi di Indonesia, hak dan kewajiban warga negara, perlindungan HAM, partisipasi warga, hoaks dan ujaran kebencian, dan masa depan demokrasi Indonesia.

4. Kesimpulan

Berdasarkan data yang kami kumpulkan dan program yang kami selenggarakan, kami menyimpulkan beberapa hal, antara lain: *pertama*, masyarakat Desa Nglinggi masih memiliki harapan untuk demokrasi Indonesia yang lebih baik, walaupun ada sedikit pesimisme yang dimiliki saat ini. *Kedua*, semangat berpartisipasi warga Desa Nglinggi perlu dikelola, sehingga dapat optimal untuk kepentingan warga desa secara kolektif. *Ketiga*, pengetahuan dan keterampilan berdemokrasi warga Desa Nglinggi masih dapat ditingkatkan, untuk menjadi desa contoh yang menerapkan demokrasi di level warga. *Keempat*, Desa Nglinggi layak dijadikan salah satu rujukan desa yang telah menerapkan demokrasi yang baik.

5. Referensi

Aspinall, E., Fossati, D., Muhtadi, B., & Warburton, E. (2020). Elites, masses, and democratic decline in Indonesia. *Democratization*, 27(4), 505–526. <https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1680971>

Aspinall, E., & Mietzner, M. (2019). Indonesia’s Democratic Paradox: Competitive Elections amidst Rising Illiberalism. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 55(3), 295–317. <https://doi.org/10.1080/00074918.2019.1690412>

Bunte, M., & Ufen, A. (2009). *Democratization in Post-Suharto Indonesia*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203934760>

Diprose, R., McRae, D., & Hadiz, V. R. (2019). Two Decades of Reformasi in Indonesia: Its Illiberal Turn. *Journal of Contemporary Asia*, 49(5), 691–712. <https://doi.org/10.1080/00472336.2019.1637922>

Grice, George L. & John F. Skinner. (2013). *Mastering Public Speaking*. Sant Antonio: Pearson

Johansson, A. C. (2016). *Social Media and Politics in Indonesia* (Issue 42).

Lim, M. (2018). *Disciplining Dissent: Freedom, Control, and Digital Activism in Southeast Asia*. In *Routledge Handbook of Urbanization*

- in Southeast Asia (Issue June, pp. 478–494). Routledge.
- Lucas, Stephen E. (2020). *The Arts of Public Speaking* (Tenth Edition). Boston: McGraw-Hill.
- Onong, Uchjana Effendy. (2004). *Ilmu Komunikasi Teori Dan Praktek*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Power, T. P. (2018). Jokowi's authoritarian turn and Indonesia's democratic decline. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 54(3), 307–338. <https://doi.org/10.1080/00074918.2018.1549918>.
- Sagan, C., & Leighton, T. (2020). The Internet and The Future of News. *American Study of Arts and Sciences* 139 (2), 119-125.
- Supriyanto. (2014). Pemberdayaan Teknologi Informasi untuk Keunggulan Bisnis. *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, 2 (1), 99-112.
- Sen, A. (1997). *Human Rights and Asian Values*. Carnegie Council for Ethics in Internantional Affairs. <https://www.carnegiecouncil.org/media/series/morgenthau/morgenthau-lectures-1981-2006-human-rights-and-asian-values>
- Vickers, A. (2005). *A History of Modern Indonesia* (Second Edi). Cambridge University Press.
- Wijaya (2000). *Ilmu Komunikasi Pengantar Studi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.